

Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan

Suatu Pendekatan Heterodoks



**Muhamad Karim
Daud Yusuf
Emy Saelan**

TESTIMONI

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan sumber daya kelautannya. Melalui pendekatan heterodoks yang diangkat dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk melihat pembangunan kelautan dari perspektif yang lebih progresif dan inklusif, mengedepankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Buku ini memberikan analisis kritis atas paradigma pembangunan kelautan yang selama ini berlaku dan menawarkan alternatif strategis yang dapat menjadi pijakan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi. Pendekatan yang diusulkan sangat relevan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi penting yang memicu pemikiran dan diskusi lebih luas mengenai pembangunan kelautan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan sumber daya. Selamat membaca dan berinspirasi bagi kita semua.

Asep Wahyuwijaya
Anggota DPR RI

Kita patut berterima kasih kepada para penulis buku ini karena berhasil menunjukkan paradigma alternatif dari tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang selama ini diperlakukan secara eksplotatif, sebagaimana selama ini darat diperlakukan. Buku ini berhasil menunjukkan borok ekonomi pertumbuhan yang selama ini merusak laut dan menyebabkan

krisis sosial-ekonomi serta sosial-ekologis dalam skala planet. Bumi kita membutuhkan puasa pertumbuhan supaya bisa lestari dalam beberapa abad ke depan. Perubahan mendasar dari paradigma ekonomi-politik yang sangat dibutuhkan, berhasil dijelaskan oleh penulis buku ini. Sangat relevan bagi siapa pun yang berminat mempelajari keadilan ekologis dan atau keadilan iklim.

Parid Ridwanuddin

Peneliti isu Kelautan Auriga Nusantara, Dosen Departemen Filsafat
Universitas Paramadina Jakarta

Buku ini memberikan perspektif baru terhadap kondisi realitas, solusi alternatif terkait kebijakan kelautan dan perikanan Indonesia. Menelaah secara kritis dan komprehensif problematika kehidupan masyarakat pesisir serta kebijakan Kelautan dan Perikanan pemerintah Indonesia. Menghadirkan ide baru untuk mensejahterakan masyarakat pesisir Indonesia melalui model heterodoks. Merumuskan solusi kebijakan dalam menyelesaikan kondisi paradoks klasik, nelayan miskin di tengah kelimpahan sumber daya kelautan dan perikanan. Mewujudnyatakan cita-cita negara bangsa Indonesia yakni menyejahterakan rakyat dalam berbagai perspektif kritis tentang kebijakan kelautan dan perikanan. Sangat tepat dijadikan bahan bacaan dan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, serta birokrat kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dr. Abdul Matalib Angkotasan, S.Pi., M.si.

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun

Buku ini merupakan kontribusi pemikiran yang bernalih bagi pengembangan wacana pembangunan kelautan Indonesia. Kehadirannya membuka ruang dialog baru sekaligus menawarkan sudut pandang segar dalam memahami isu kelautan. Melalui gagasan yang tersusun runtut dan bahasa yang komunikatif, penulis mengajak pembaca meninjau kembali arah pengelolaan sumber daya laut dengan cara pandang yang lebih kritis dan inklusif.

Penyajian yang terstruktur memudahkan buku ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pengambil kebijakan, hingga masyarakat yang peduli pada kelestarian laut. Setiap bagian memantik rasa ingin tahu dan mendorong pembaca mengeksplorasi cara-cara baru dalam melihat laut dan pesisir.

Di tengah tantangan degradasi lingkungan dan ketimpangan pemanfaatan sumber daya kelautan, buku ini hadir sebagai referensi yang relevan. Pemikiran yang ditawarkan di dalamnya dapat memperkaya wawasan dan memperluas perspektif pembaca dalam memahami isu-isu kelautan. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan dan memberi manfaat luas bagi upaya dalam menjaga serta mengelola laut Indonesia demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.

Dr. Eng. Sri Maryati
Ketua PPIIG Universitas Negeri Gorontalo

Buku *Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks* adalah karya yang relevan untuk masa depan pembangunan kelautan serta perikanan Indonesia. Dengan pendekatan heterodoks yang kritis dan konstruktif, buku ini tidak hanya menjelaskan dinamika dan tantangan politik serta ekonomi kelautan secara mendalam, tetapi juga menghadirkan model-model pembangunan alternatif yang inovatif dan berkelanjutan sesuai konteks lokal dan global.

Penulis berhasil menggabungkan esensi teori pembangunan ekonomi alternatif secara holistik dengan isu konkret kelautan, perubahan iklim, dan kesejahteraan nelayan, sehingga menghasilkan pemikiran yang segar dan mendapat panggung baru dalam diskursus pembangunan nasional. Buku ini layak dibaca oleh pengambil kebijakan, akademisi, aktivis lingkungan, serta semua yang peduli pada masa depan kemaritiman dan ekologi Indonesia.

Sebagai sebuah karya yang kaya perspektif dan penuh pemikiran kritis, buku ini sangat direkomendasikan menjadi referensi utama dalam studi

ekonomi politik pembangunan kelautan, serta inspirasi bagi pengembangan kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai cita-cita negara kesejahteraan Indonesia.

Prima Gandhi

Dosen Vokasi IPB University, Mahasiswa Program Doktor,
Tokyo University of Agriculture/Ketua Umum Persatuan Pelajar
Indonesia di Jepang 2024/2025

Buku *Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks* merupakan karya yang sangat cemerlang dan penuh wawasan, memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan solusi untuk pembangunan kelautan di Indonesia. Penulis dengan sangat teliti dan cerdas mengintegrasikan konsep-konsep heterodoks dalam ekonomi dengan isu-isu mendasar dalam kelautan, perikanan, dan kemaritiman, serta dampak perubahan iklim. Buku ini menggugah pembaca untuk melihat kelautan Indonesia bukan hanya sebagai sumber daya alam semata, tetapi sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Melalui model-model alternatif seperti *Blue Degrowth*, *Blue Justice*, dan *Ekonomi Nusantara*, penulis menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial-ekonomi. Tidak hanya mengkritisi kebijakan yang ada, buku ini juga memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan, terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini terabaikan. Buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang peduli terhadap masa depan pembangunan kelautan yang lebih berkelanjutan dan adil, serta menjadi sumber inspirasi dalam membangun negara kesejahteraan yang berakar pada kekayaan maritim Indonesia.

Lestari Agusalim

Dosen Ekonomi Pembangunan, Universitas Trilogi

Bang Karim dan rekan dalam buku ini memberikan perspektif yang segar dan kritis mengenai pembangunan kelautan dan perikanan dengan berusaha keluar dari kerangka pembangunan *mainstream* yang selama ini terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata. Penulis memberikan energi (sehingga lebih bertenaga) terhadap berbagai tulisan yang ditulisnya di berbagai media, dengan menawarkan pendekatan heterodoks yang lebih menekankan pada keadilan, keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Buku ini ditulis dengan argumentasi yang tajam dalam mengkritik paradigma pembangunan yang eksplotatif dan kurang berpihak pada rakyat kecil. Penulis menekankan bahwa laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang terkait erat dengan identitas, budaya, dan kedaulatan bangsa. Inilah kekuatan dari buku yang kaya akan tawaran-tawaran model alternatif pembangunan ekonomi dan tata kelola kelautan ini.

Buku ini cukup padat secara teoretis sehingga pembaca mungkin membutuhkan waktu lebih untuk memahami konsep-konsep heterodoks yang digunakan. Namun bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, aktivis, maupun praktisi pembangunan kelautan, karya ini sangat berharga karena membuka ruang diskusi baru tentang arah pembangunan kelautan, perikanan dan kemaritiman Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penulis tidak hanya sekadar memberi tawaran akademis, melainkan juga ajakan untuk merefleksikan ulang arah pembangunan kelautan, perikanan dan keamritiman Indonesia agar benar-benar mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan.

Auhadillah Azizy

Peneliti Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN)

Buku karya Muhamad Karim dan rekan yang berjudul *Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks*, merupakan gagasan kritis-konstruktif dalam pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan. Buku ini menyajikan gagasan-gagasan berasa untuk

mengatasi problem struktural yakni kemiskinan, deplesi sumberdaya alam, dan menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan ekosistem penopangnya. Buku ini juga mengajukan gagasan-gagasan alternatif yang keluar dari pemikiran ekonomi *mainstream* (ortodoks), yang menghegemoni dunia dewasa, ini seperti *Blue Degrowth*, *Blue Justice*, *Steady State Economy* dan *Cosmos Economy*. Makanya, dalam pandangan saya buku ini mengajukan suatu paradigma heterodoks/eklektik yang melahirkan suatu model-model pembangunan alternatif yang khas Indonesia (*genuine*) dan disinergikan dengan teknologi baru, inovasi hingga efisiensi.

Dr. H. Sutomo, M.Si.

Wakil Bendahara Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) 2023-2027 dan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) 2023-2027

PARADIGMA ALTERNATIF PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

Suatu Pendekatan Heterodoks

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PARADIGMA ALTERNATIF PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

Suatu Pendekatan Heterodoks

**Muhamad Karim
Daud Yusuf
Emy Saelan**



PARADIGMA ALTERNATIF PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

Suatu Pendekatan Heterodoks

© Muhamad Karim
Daud Yusuf
Emy Saelan

xxxiv + 428 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-634-254-024-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Cetakan I, Oktober 2025

Penulis : Muhamad Karim
Daud Yusuf
Emy Saelan
Editor : Hanita Ayu
Sampul : Muhammad Taufiq
Layout : Muhammad Taufiq

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Wonocatur Gg. Gayam No. 402 RT. 08/RW. 25
Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta 55198
Email: admin@samudrabiru.co.id
Website: www.samudrabiru.co.id
WA/Call: 0812-2607-5872

PENGANTAR

Prof. Dr. Sofyan Sjaf

Dekan Fakultas Ekologi Manusia

Institut Pertanian Bogor

Buku berjudul *Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks* hadir di tengah krisis paradigma pembangunan kelautan yang selama ini cenderung terjebak dalam arus utama (*mainstream*) ekonomi global. Selama beberapa dekade, pembangunan kelautan Indonesia lebih banyak diarahkan oleh logika pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari teori ekonomi ortodoks—kapitalisme maupun strukturalisme—yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya laut demi kepentingan pasar, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis menciptakan kesejahteraan.

Pengalaman di lapangan menunjukkan, paradigma ini justru melahirkan paradoks bahwa laut kita kaya, namun masyarakat pesisir, terutama nelayan skala kecil, tetap berada dalam pusaran kemiskinan struktural. Liberalisasi perikanan, privatisasi ruang laut, serta adopsi konsep “ekonomi biru” tanpa kritik, sering kali justru memperkuat konsentrasi penguasaan sumber daya di tangan korporasi besar, mengorbankan keberlanjutan ekologi, dan meminggirkan komunitas lokal.

Buku ini menawarkan jalan alternatif melalui pendekatan ekonomi politik heterodoks, yang berpijak pada kritik terhadap ortodoksi ekonomi, sekaligus membangun tawaran konstruktif berbasis keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, dan kedaulatan komunitas. Pendekatan ini memandang pembangunan kelautan bukan sekadar urusan memaksimalkan pertumbuhan dan investasi, tetapi proses yang menempatkan manusia—terutama komunitas pesisir—sebagai subjek yang berdaulat atas ruang hidupnya.

Relevansi dengan Penguatan Desa Pesisir

Gagasan dalam buku ini memiliki irisan langsung dengan upaya penguatan desa pesisir berbasis Data Desa Presisi (DDP), di mana kami sebagai penggagasnya. DDP merupakan sebuah inovasi metodologi pemetaan dan pendataan desa yang menggabungkan teknologi spasial presisi, data sensus partisipatif, dan verifikasi lapangan berbasis komunitas. Dalam konteks desa pesisir, DDP mampu mengungkap realitas sosial-ekonomi-ekologi secara detail dan akurat—mulai dari sebaran rumah tangga nelayan, status kepemilikan alat tangkap, kondisi terumbu karang, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Pengalaman penerapan DDP di sejumlah desa pesisir menunjukkan dua hal penting. Pertama, kebijakan yang tepat membutuhkan data yang presisi dan berpihak. Banyak program pembangunan kelautan gagal menjangkau kelompok yang paling rentan karena basis datanya tidak akurat atau terlalu agregat. Dengan DDP, program seperti subsidi BBM nelayan, perbaikan infrastruktur dermaga, hingga rehabilitasi mangrove dapat diarahkan tepat sasaran. Kedua, data presisi membuka ruang partisipasi warga dalam perencanaan. Pendataan yang melibatkan masyarakat pesisir bukan hanya menghasilkan data yang valid, tetapi juga membangun rasa memiliki dan kesadaran kritis akan pentingnya mengelola ruang laut secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pendekatan heterodoks yang diusung buku ini menemukan landasan praksisnya melalui DDP: keduanya sama-sama menolak model pembangunan *top-down* yang a-historis dan mengabaikan konteks lokal, serta sama-sama mendorong partisipasi aktif komunitas dalam menentukan arah pembangunan.

Menjembatani Teori dan Praktik

Paradigma alternatif dalam buku ini memuat model-model ekonomi baru, seperti: *Blue degrowth*, *blue justice*, *buen vivir*, *doughnut economics*, *cosmos economics*, dan ekonomi nusantara. Semuanya memiliki satu benang merah, yaitu menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan batas-batas ekologi, sambil menjamin distribusi manfaat yang adil.

DDP menjadi instrumen yang konkret untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ini di tingkat desa pesisir. Sebagai misalnya, *blue justice* dapat diimplementasikan dengan memastikan bahwa wilayah tangkap nelayan tradisional dipetakan dan dilindungi melalui tata ruang laut berbasis DDP. Tidak hanya itu, *doughnut economics* dapat dipraktikkan dengan memantau indikator kesejahteraan sosial (pendapatan, pendidikan, kesehatan) sekaligus indikator ekologis (kualitas perairan, tutupan mangrove, stok ikan) secara simultan. Juga ekonomi nusantara yang menggabungkan kearifan lokal dan inovasi modern dapat diwujudkan dengan memetakan dan menghidupkan kembali praktik-praktik pengelolaan laut berbasis adat, seperti sasi di Maluku atau awig-awig di Lombok, sambil memanfaatkan teknologi pemantauan laut.

Kemudian, berangkat dari sintesis gagasan dalam buku ini dan pengalaman penerapan DDP, terdapat beberapa agenda aksi strategis yang perlu segera diarusutamakan. Pertama, reformasi paradigma pembangunan kelautan. Pemerintah pusat dan daerah perlu meninggalkan ketergantungan pada indikator pertumbuhan semata dan mengadopsi paradigma yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, dan kedaulatan komunitas. Kedua, pelembagaan Data Presisi untuk Desa Pesisir. DDP harus diakui secara resmi sebagai basis perencanaan pembangunan pesisir dan laut, serta diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan desa, kabupaten, hingga nasional. Ketiga, penguatan Hak Kelola Komunitas. Hasil pemetaan DDP harus menjadi dasar untuk menetapkan dan melindungi hak-hak nelayan tradisional, termasuk wilayah tangkap, akses ke sumber daya, dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis komunitas.

Keempat, zona kebijakan eksperimental. Sejalan dengan rekomendasi buku ini, perlu dibentuk zona kebijakan percontohan yang menerapkan kombinasi paradigma alternatif—misalnya pembatasan tangkap (*steady*

state), redistribusi manfaat (*degrowth*), dan insentif inovasi hijau (*green growth*)—dengan pemantauan berbasis DDP. Kelima, pendidikan dan literasi kelautan. Reformasi pendidikan ekonomi dan kelautan harus mengintegrasikan perspektif heterodoks dan data presisi, agar generasi muda pesisir memiliki kapasitas kritis sekaligus keterampilan teknis dalam mengelola laut secara berkelanjutan. Keenam, penguatan jejaring Desa Pesisir. Membangun jaringan antardesa pesisir berbasis DDP untuk saling belajar, bertukar praktik baik, dan memperkuat posisi tawar dalam advokasi kebijakan. Ketujuh, integrasi mitigasi perubahan iklim. Menggunakan data presisi untuk merancang strategi adaptasi lokal—misalnya diversifikasi mata pencaharian, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan perlindungan infrastruktur kritis dari kenaikan muka air laut.

Akhirnya, buku ini bukan hanya sebuah kritik terhadap kegagalan paradigma lama, tetapi juga sebuah undangan untuk membangun masa depan kelautan Indonesia yang adil, lestari, dan berdaulat. Ketika gagasan-gagasan heterodoks yang diusung buku ini bersinergi dengan instrumen-instrumen inovatif seperti Data Desa Presisi, kita memiliki peluang nyata untuk mengubah wajah desa pesisir—dari objek pembangunan menjadi subjek yang menentukan jalannya sendiri.

Saya percaya bahwa masa depan kelautan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk membaca laut bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang sarat makna sosial, budaya, dan ekologis. Dengan menguatkan desa pesisir berbasis data presisi, kita tidak hanya mengumpulkan angka, tetapi juga membangun fondasi bagi terwujudnya negara kesejahteraan yang berakar pada kedaulatan rakyat dan kelestarian alam.

Semoga buku ini menjadi inspirasi sekaligus panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan terutama masyarakat pesisir sendiri, untuk bersama-sama mengarungi perubahan menuju paradigma baru yang lebih adil dan berkelanjutan.

Bogor, 3 September 2025

PENGANTAR

Dr. Suhana, S.Pi, M.Si

Wakil Rektor III

Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

Ketika berbicara tentang laut Indonesia, sering kali yang terbayang adalah kekayaan sumber daya yang melimpah, potensi ekonomi yang besar, dan identitas kita sebagai bangsa maritim. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang jarang kita lihat, yaitu ketimpangan dan penurunan kesejahteraan nelayan, privatisasi sumber daya laut, hingga kerusakan ekosistem yang semakin mengkhawatirkan.

Selain itu, potensi yang besar tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, bahkan pada tahun 2024 ekonomi perikanan cenderung anjlok. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB sektor perikanan yang hanya mencapai 0,68% (BPS 2025) atau anjlok jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,49%. Berdasarkan catatan historis pertumbuhan PDB sektor perikanan terlihat bahwa capaian pertumbuhan PDB perikanan 2024 lebih rendah dibandingkan pada saat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi 1998. Pada saat pandemic Covid-19 (2022) pertumbuhan PDB perikanan mencapai 0,73%, sementara pada saat krisis ekonomi 1998 pertumbuhan PDB perikanan capai 1,92%.

Terpuruknya capaian pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang belum sesuai dengan harapan publik. Oleh sebab itu, diperlukan untuk meninjau dan menata ulang kebijakan kelautan dan perikanan yang ada saat ini. Kebijakan ekonomi biru yang menjadi jargon Menteri Kelautan dan Perikanan ternyata belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Bahkan yang terlihat dilapangan kebijakan ekonomi biru tersebut banyak menimbulkan berbagai paradoks atau kontradiksi.

Ketimpangan kesejahteraan nelayan juga tercermin dari data NTN (Nilai Tukar Nelayan) periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Pada 2021, NTN mencapai angka 104,69, mencerminkan stabilitas ekonomi nelayan dan usahanya. Namun, dari 2023 hingga 2024 terjadi penurunan signifikan. NTN turun dari 106,45 (2022) menjadi 105,40 (2023) dan anjlok ke 101,76 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan besar yang mengancam keberlanjutan ekonomi perikanan, baik pada level individu maupun kolektif.

Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (ib) meningkat tajam dari 106,41 (2021) ke 118,77 (2024), terutama pada konsumsi rumah tangga, seperti makanan, minuman, dan tembakau yang melonjak hingga 126,17. Kenaikan ini menandakan tekanan biaya hidup, yang berisiko mengurangi daya beli petani. Biaya produksi juga meningkat, tercermin dari kenaikan Indeks BPPBM, dengan lonjakan terbesar pada transportasi dan komunikasi (103,26 ke 121,02).

Sementara itu, Indeks Harga yang Diterima Nelayan (it) naik hingga 122 (2023) namun turun ke 120,86 (2024). Penurunan ini di sektor perikanan tangkap laut (121 pada 2024) dapat mengindikasikan tantangan pasar atau penurunan hasil tangkapan. Kombinasi ini memperburuk nilai tukar nelayan (NTN) yang turun dari 106,45 (2022) ke 101,76 (2024), mencerminkan pendapatan nelayan tidak sebanding dengan kenaikan biaya yang mereka tanggung.

Kondisi NTN tersebut menunjukkan ketimpangan struktural antara biaya hidup/produksi dan pendapatan sektor primer. Jika tidak diatasi,

hal ini dapat memperburuk kesejahteraan nelayan serta menurunkan daya saing sektor perikanan.

Buku *Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks* hadir tepat di tengah kegelisahan tersebut. Karya Muhamad Karim, Daud Yusuf, dan Emy Saelan ini menawarkan cara pandang yang berbeda, segar, dan berani—sebuah ajakan untuk meninjau ulang cara kita memahami pembangunan kelautan Indonesia.

Alih-alih mengikuti arus besar ekonomi ortodoks yang menekankan pertumbuhan tanpa batas, buku ini mengajak kita melihat laut dengan perspektif yang lebih utuh, yaitu dengan memadukan ekonomi, ekologi, keadilan sosial, hingga kearifan lokal. Dari konsep *Blue Justice* hingga *Ekonomi Nusantara*, dari kritik atas liberalisasi sumber daya hingga gagasan rekonstruksi ekonomi biru, buku ini membentangkan peta jalan menuju pembangunan kelautan yang berpihak pada manusia dan alam.

Hadir di era *blue economy* yang digadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi laut Indonesia, buku ini kini mengajak pembaca menatap lebih kritis, di mana ekonomi biru global belum tentu adil. Berbagai kajian internasional menyebutkan bahwa *blue economy* yang digerakkan investasi ekstraktif sering kali mem marginalisasi komunitas lokal—contohnya proyek percontohan di Lombok yang belum memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir

Di panggung nasional, Indonesia terus mendorong kebijakan *blue economy* melalui berbagai kebijakan dan keterlibatan aktif dalam forum IORA. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara gagasan besar dan keterlaksanaan kebijakan yang konsisten, di mana proyek *blue economy* sering dirundung birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya perlindungan terhadap nelayan skala kecil.

Kini penguatan kerangka hukum menjadi sorotan penting, karena kekosongan hukum dan fragmentasi regulasi menghambat transparansi serta investasi yang berkelanjutan. Tokoh hukum menyarankan pembentukan Pengadilan Niaga Maritim khusus untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan menambah kepastian hukum sektor maritim.

Sementara itu, dalam diskursus global tentang pembangunan pascaekonomi, konsep *degrowth* semakin relevan bahkan untuk negara-negara Global South. Amerika Latin dan Asia memulai pendekatan *degrowth* yang memperhatikan keadilan sosial dan ekologi, memperingatkan bahwa pertumbuhan tanpa batas tidak bisa jadi strategi jangka panjang.

Sebagai alternatif, pendekatan *Blue Justice* mendapat tempat penting dalam pemikiran heterodoks: ia mengakui hak nelayan kecil, keadilan akses laut, dan partisipasi masyarakat lokal dalam skema ekonomi laut. Konsep ini resonan dengan kritik ekonomi feminis, ekososialisme, maupun pendekatan ekologi ekonomi yang lebih holistik—semua membangun sinergi dengan kerangka heterodoks yang penulis paparkan di dalam buku ini.

Lebih dari itu, tantangan teknologi dan infrastruktur menjadi realitas hari ini. Logistik antarpulau yang belum merata, minimnya teknologi riset kelautan, serta lemahnya pemanfaatan teknologi digital membuat potensi laut Indonesia belum tergarap optimal. Di tingkat global, transformasi digital dan AI mulai memasuki sektor maritim sebagai bagian dari *decarbonization*—namun belum dirasakan di banyak daerah pesisir Indonesia.

Maka buku ini ditulis dengan kesadaran atas momentum transformatif tersebut. Menggunakan pendekatan heterodoks, ekologi ekonomi, keadilan sosial, dan kearifan lokal, penulis menyajikan model pembangunan kelautan yang bukan sekadar menggulir jargon, tetapi dibangun atas fondasi kritis dan solutif.

Membaca buku ini serasa diajak berlayar, kita diajak menelusuri sejarah pemikiran heterodoks, menyingkap dinamika politik kelautan, memahami tantangan perubahan iklim, hingga memikirkan masa depan kesejahteraan nelayan. Setiap babnya disajikan dengan argumentasi tajam namun mudah diikuti, sehingga buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang peduli pada masa depan laut Indonesia.

Saya meyakini buku ini akan menjadi bacaan penting bagi siapa pun yang ingin melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara yang kaya laut, tetapi juga sebagai negara maritim yang adil, berdaulat, sejahtera dan

lestari. Dengan pendekatan yang kritis sekaligus solutif, buku ini tidak hanya mengurai masalah, tetapi juga memberi harapan dan arah.

Selamat membaca, dan mari bersama-sama merawat laut sebagai jalan menuju kesejahteraan bangsa!

Jakarta, Agustus 2025

PRAKATA

Buku yang kami tulis ini berjudul *Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks*. Awalnya tulisan-tulisan dalam buku ini hanya bersumber dari artikel penulis di media massa nasional dan *online*, di antaranya Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo, dan Investor Daily. Tulisan-tulisan ini disajikan dalam bagian 6 hingga bagian 10. Topiknya pun lebih dominan membahas pembangunan kelautan, perikanan dan kemaritiman secara spesifik termasuk soal dampak perubahan iklim terhadap laut dan perikanan hingga krisis ekologi. Akan tetapi, setelah penulis membaca ulang, timbul gagasan baru yang bertujuan memberikan “nyawa” terhadap isi buku ini.

Untuk itu penulis menambahkan dengan konsep-konsep dan teori pembangunan ekonomi alternatif yang kini naik daun secara global utamanya yang berhaluan “heterodoks”. Suatu pendekatan ekonomi politik dan pembangunan yang menyempal dari kapitalisme maupun strukturalisme, sosialisme. Konsep dan teori-teori tersebut disajikan pada bagian 2 sampai bagian 5. Mengenai hal ini, terdapat beberapa argumentasi. Pertama, tulisan-tulisan yang tercantum dalam bagian 6 hingga bagian 10 semuanya berbasiskan konsep dan teori yang dipaparkan di bagian 1 hingga 5. Mulai dari landasan ontologis, epistemologi hingga aksiologinya.

Kedua, gagasan-gagasan baru yang dikemukakan pada bagian 6 hingga 10 berdasarkan dekonstruksi dan rekonstruksi secara empiris konsep dan teori heterodoks secara aksiologi sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang bersifat holistik dan realisme. Ketiga, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan di bagian 6 hingga 10 semuanya beraliran heterodoks kritik-konstruktivisme. Meskipun demikian, memberikan gagasan alternatif baru yang bisa diterapkan dalam bidang kelautan, perikanan, maritim hingga dalam isu perubahan iklim.

Buku ini memiliki 11 bagian. Bagian 1 merupakan prawacana yang menguraikan dasar pemikiran yang mendasari penulisan buku ini. Bagian 2 menguraikan “*Sejarah dan Varian Pemikiran Heterodoks*”. Cakupan dalam bagian ini terdiri atas (i) Konsep dan Dinamika Aliran Heterodoks (ii) Heterodoks Versus Ortodoks, (iii) Heterodoks Aliran Neo-Austrian, (iv) Heterodoksi Aliran Kiri, dan (v) Heterodoksi Baru. Dari bagian ini hendak memberikan perspektif dan pemahaman tentang aliran heterosoks dengan beragam variannya.

Bagian 3 membahas “*Aliran Heterodoks dalam Ekologi Ekonomi*”. Bagian ini mencakup: (i) Ekologi Ekonomi sebagai Varian Pendekatan Heterodoks, (ii) Sejarah Pemikiran Ekologi Ekonomi, (ii) Pendekatan Heterodoks Aliran Kritis Dalam Sosial, Ekologi-Ekonomi. Selama ini paradigma ekologi ekonomi cenderung menerapkan mazhab pemikiran ekonomi aliran ekonomi arus utama (ortodoks). Jarang sekali menggunakan pendekatan ekologi ekonomi beraliran heterodoks dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya kelautan. Padahal dalam ekologi ekonomi heterodoks memiliki empat aliran yaitu (a) Aliran Eko-Marxisme dan Eko-Sosialisme; (b) Aliran Ekonomi Institusional Kritis; (c) Aliran Ekonomi Feminis dan Eko-Feminisme; serta (d) Aliran Ekonomi Post Keynesian dan Makroekonomi Ekologi. Meskipun secara global aliran pemikiran ini juga masih relatif jarang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam, baik di negara-negara maju (di utara) maupun negara-negara berkembang dan terbelakang (di selatan).

Bagian 4 membahas model-model alternatif dalam pembangunan ekonomi dan tata kelola kelautan. Model-model yang disajikan dalam buku ini adalah (i) *Blue Degrowth*; (ii) *Steady State Economy*; (iii) *Blue Justice*;

(iv) *Buen Vivier*; (v) *Doughnut Economics*; (vi) *Cosmos Economics* dan (vii) *Ekonomi Nusantara: Model Hybrid Genuine Khas Indonesia*. Kelima, bagian 5 membahas enam model paradigma ekonomi dihadapkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development goals/SDGs*). Dalam bagian ini didekonstruksi enam paradigma ekonomi versus SDGs, yaitu (i) *Ekonomi Kesejahteraan Neoklasik (Neoclassical Welfare Economic)*; (ii) *Pertumbuhan Hijau (Green Growth)*; (iii) *Degrowth*; (iv) *Agrowth*; (v) *Steady State Economy*, dan (vi) *Ekonomi Donat (Doughnut Economics)*. Dalam dekonstruksi ini juga menganalisis (i) “keselarasan” Paradigma-SDGs dengan enam paradigma ekonomi; (ii) komparasi paradigma ekonomi dengan dimensi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan empat komponen yakni (a) Orientasi pertumbuhan; (b) Mekanisme perlindungan lingkungan; (c) Pertimbangan Kesetaraan; dan (d) Skala dan struktur tata kelola.

Di samping itu, dibahas juga soal tantangan dan kesenjangan dalam paradigma ekonomi maupun SDGS. Tantangan dan kesenjangan tersebut akan berimplikasi terhadap teori dan praktik pembangunan berkelanjutan yang mencakup: (i) implikasi teoretis; (iii) integrasi dan komplementaritas kebijakan, dan (iii) jalur implementasi (*Implementation Pathways*). Dari bagian memberikan uraian komprehensif bahwa tak semua paradigma ekonom termasuk yang alternatif memiliki “keselarasan” dengan tujuan dan dimensi pembangunan berkelanjutan. Makanya, dalam bagian ini berdasarkan riset Gosh & Pearson, (2025), mengusulkan empat rekomendasi spesifik: (1) mengembangkan kerangka penilaian terpadu yang menggabungkan kekuatan-kekuatan komplementer dari berbagai paradigma ekonomi, khususnya dalam mengatasi kesenjangan dimensi sosial, sekaligus melanjutkan pendekatan transdisipliner yang dirintis Costanza *et al.* (2016); (2) membangun zona kebijakan eksperimental untuk menguji pendekatan ekonomi alternatif secara konkret. Zona ini bakal menjadi laboratorium kebijakan yang menerapkan paket kebijakan terpadu, seperti pembatasan penggunaan sumber daya (*steady state economics*), mekanisme redistribusi (*degrowth*), serta insentif untuk inovasi hijau (*green growth*); (3) mereformasi pendidikan ekonomi dengan mengintegrasikan berbagai paradigma ekonomi, sebagai respons terhadap aliran ekonomi ortodoks yang dikritik oleh Raworth (2017),

sekaligus memperluas konseptualnya yang diperuntukkan bagi pengambil kebijakan masa depan, dan (4) membangun jalur transisi yang kontekstual, bagi negara-negara berpendapatan tinggi yang menekankan pengurangan konsumsi (*elemen degrowth*). Sementara bagi negara-negara berpendapatan rendah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar melalui proses pembangunan yang mengefisienkan pemanfaatan sumber daya, yakni mengombinasikan pendekatan *Green Growth* dan *Doughnut Economics*.

Bagian 6 membahas dinamika politik kelautan baik di level nasional maupun global. Umpamanya: (i) menyangkut kinerja sektor kelautan di masa pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2023, (ii) melihat keterkaitan Indonesia sebagai anggota G-20 dengan politik kelautan kita; dan (ii) ambisi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumber daya ikan dan bisnis pasir laut. Padahal ekspor pasir laut berimplikasi kompleks terhadap aspek geopolitik (kedaulatan negara), geoekonomi dan ekologi.

Bagian 7 mengkritik liberalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Privatisasi perikanan menjadi kebijakan nasional yang didorong pemerintah dewasa ini meskipun mendapatkan kritikan dari berbagai pihak khususnya penangkapan ikan terukur (PIT) yang berorientasi industrial. Privatisasi perikanan juga ditopang UU Cipta Kerja sebagai payung hukumnya sehingga tampak jelas pemerintah mengedepankan liberalisasi sumberdaya ikan hanya demi mengejar investasi. Tanpa mempertimbangkan nasib nelayan tradisional, buruh nelayan, perempuan nelayan dan pelaku usaha mikro dan kecil di sektor perikanan yang kian dimarginalkan dan ditindas oleh kebijakan ekstraktif negara. Ironisnya lagi, UU tersebut dan turunannya membolehkan mengubah kawasan konservasi (inti) menjadi pemanfaatan yang bakal mengancam kawasan konservasi laut di perairan Indonesia. Di bagian ini juga mengkritisi gagasan *shrimp estate* yang direncanakan di pantai utara Jawa yang otomatis berimplikasi terhadap deforestasi vetegasi pesisir (mangrove dan sejenisnya) dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ditambah pula rencana pelelangan pulau kecil ke pihak asing (kasus Kepulauan Widi) yang mustahil menyejahterakan masyarakatnya.

Bagian 8 memaparkan tantangan dan agenda kesejahteraan nelayan. Kesejahteraan nelayan menjadi problem krusial dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Pasalnya, tak ada gunanya menerbitkan beragam kebijakan tapi faktanya malahan memperparah kemiskinan nelayan secara struktural. Berbagai isu strategis yang diulaskan dalam bagian ini: (i) perempuan nelayan; (ii) subsidi perikanan; (iii) kejahanatan perikanan terutama soal *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF); (iv) kebijakan afirmatif buat nelayan skala kecil; (v) ancaman krisis pangan berbasis ikan (vi) buruh nelayan; (v) ekonomi biru memarjinalkan nelayan, dan (vi) transisi energi.

Bagian 9 membahas kemaritiman dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Di sektor kemaritiman perubahan iklim berdampak sangat kompleks sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat transdisiplin, multi disiplin dan antardisiplin keilmuan. Isu-isu menarik terkait perubahan iklim antara lain: (i) kontribusi privatisasi perikanan terhadap terhadap emisi gas rumah kaca karena penggunaan bahan bakar fosil. Emisi ini bersumber dari perikanan industrial yang boros bahan bakar fosil sehingga menghasilkan emisi CO2. Dampaknya, bukan hanya terhadap summerdaya ikan dan ekosistemnya (habitat), melainkan juga berpengaruh terhadap sumber kehidupan nelayan skala kecil. Implikasinya akan memproduksi ketidakadilan ekologi, ekonomi dan iklim yang otomatis kian memperparah kehidupan sosial ekonomi nelayan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Bagian 10 membahas bagaimana masa depan pembangunan kelautan menuju negara kesejahteraan *ala* Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945. Topik yang banyak diulaskan dalam bagian ini adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang mengusung ekonomi biru sebagai “arus utama” dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Padahal, ekonomi biru tidak demikian sehingga di bagian ini menjelaskan (i) paradoks ekonomi biru, (ii) ketidakadilan bagi perikanan skala kecil akibat penerapannya berdasarkan pengalaman di berbagai negara, (iii) terjadinya perampasan ruang laut dan sumberdayanya akibat penerapannya; (iv) ekonomi biru ternyata sebagai “kedok” menumpuk utang dan ekstraktivisme tambang di pesisir dan pulau kecil; (v) maraknya oligarki perikanan. Makanya, dalam bagian ini menawarkan (i) antitesis ekonomi biru berbasiskan keadilan; (ii) rekonstruksi

ekonomi biru berbasiskan pendekatan alternatif termasuk untuk kawasan konservasi, dan (iii) merekonstruksi eksistensi dan budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Secara komprehensif dan detail, tawaran pemikiran alternatif sebagai antitesis ekonomi biru telah diterbitkan dalam sebuah buku berjudul *Ekonomi Nusantara Antitesis Ekonomi Biru: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*. Buku ini merupakan karya dari Muhamad Karim dan Parid Ridwanuddin yang diterbitkan Samudra Biru, Yogyakarta, tahun 2025.

Bagian 11 merupakan penutup dari buku ini yang menguraikan esensi dan gagasan-gagasan terbaru yang diusung dari penerbitan buku ini. Buku yang kami tulis ini tentu masih mengandung kekurangan, tetapi setidaknya memberikan perspektif baru dalam pembangunan kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Imbasnya, para pengambil kebijakan, politisi, akademisi, pegiat gerakan masyarakat sipil memiliki kerangka berpikir dan gagasan terbaru bersifat alternatif serta berhaluan heterodoks untuk mewujudkan negara kesejahteraan *ala* Indonesia.

Dalam penerbitan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Kanda Asep Wahyu Wijaya, Anggota DPR RI yang telah memberikan dukungan dalam proses penerbitannya. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Dr. H. Sutomo, Wakil Bendahara HNSI dan Wakil Ketua ISPIKANI yang juga memberikan dukungan dalam penerbitan buku ini. Dukungan juga diberikan oleh Prima Gandhi dan Aria Andriyadi sehingga buku ini tersaji di hadapan pembaca yang budiman. Kami berharap kritik dan saran konstruktif untuk menyempurnakan buku ini sehingga menjadi referensi komprehensif dan holistik dalam dialektika pemikiran ekonomi politik dan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PROF. DR. SOFYAN SJAF.....	xi
PENGANTAR DR. SUHANA, S.PI., M.SI.....	xv
PRAKATA.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR TABEL.....	xxxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxxiii
BAGIAN 1. PRAWACANA.....	1
BAGIAN 2. SEJARAH PEMIKIRAN HETERODOKS.....	15
» Konsep dan Dinamika Aliran Pemikiran Heterodoks.....	15
» Heterodoks versus Ortodoks	24
» Heterodoks Aliran Neo-Austrian.....	28
» Heterodoksi Aliran Kiri.....	31
» Heterodoksi Baru	33

BAGIAN 3. ALIRAN HETERODOKS DALAM EKOLOGI EKONOMI.....	45
» Ekologi Ekonomi sebagai Varian Pendekatan Heterodoks	45
» Pendekatan Heterodoks Aliran Kritis dalam Sosial, Ekologi-Ekonomi.....	70
BAGIAN 4. MODEL-MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TATA KELOLA KELAUTAN	107
» Blue Degrowth	107
» Steady State Economy.....	111
» Blue Justice.....	115
» Buen Vivier.....	120
» Doughnut Ekonomi	122
» Cosmos Economics	128
» Ekonomi Nusantara: Model Hybrid Genuine Khas Indonesia.....	140
BAGIAN 5. PARADIGMA EKONOMI VERSUS SDGs.....	149
» Dekonstruksi Paradigma Ekonomi Alternatif vis a vis SDGs	151
» Keselarasan Paradigma-SDG dengan Paradigma Ekonomi Alternatif.....	165
» Komparasi Paradigma Ekonomi dengan Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	171
» Tantangan dan Kesenjangan dalam Paradigma Ekonomi maupun SDGs.....	176
» Implikasi terhadap Teori dan Praktik Pembangunan Berkelanjutan	177
BAGIAN 6. DINAMIKA POLITIK KEMARITIMAN	185
» Kinerja Sektor Kelautan di Masa Pandemi.....	185
» G-20 dan Politik Kelautan Kita	189
» G-20 dan Skema Utang Biru.....	193

» Arah Kebijakan Perikanan dan Penerimaan Negara	197
» Demokrasi Deliberatif dalam Tata Kelola Perikanan.....	201
» Jalan Mundur Penambangan Pasir Laut	204
BAGIAN 7. KRITIK LIBERALISASI SUMBER DAYA KELAUTAN	209
» Putusan MK dan Prospek Perikanan Nasional.....	209
» Meninjau Ulang Privatisasi Lumbung Ikan Nasional	212
» Rekonstruksi PMD dan LIN	217
» Shrimp Estate dan Kesejahteraan Petambak.....	222
» Ancaman Tragedi Komoditas Perikanan	226
» Menyoal Pelelangan Kepulauan Widi.....	230
» Perppu Cipta Kerja dan Privatisasi Perikanan	234
» Liberalisasi Perikanan dan Tata Kelola Khas Indonesia	238
» Mendorong Tata Kelola Khas Indonesia	241
» UUCK Ancam Konservasi Perairan	242
» Mafia Pasir Laut.....	245
» Bencana Perikanan Industrial	248
BAGIAN 8. TANTANGAN DAN AGENDA KESEJAHTERAAN	
NELAYAN	253
» Kemerdekaan bagi Nelayan Tradisional.....	253
» Agenda Ekonomi Perempuan Nelayan.....	257
» Potensi Kejahatan Perikanan Pasca Kenaikan BBM.....	264
» Kenaikan BBM Picu Kemiskinan Nelayan?.....	268
» Kebijakan Afirmatif Nelayan Skala Kecil.....	272
» Resesi Ekonomi 2023 Ancam Pangan Protein Ikan	276
» Ekonomi Biru Memarginalkan Nelayan?	279
» Kebijakan Radikal Bagi Buruh Nelayan	283
» Pilpres 2024, Transisi Energi, dan Kemiskinan Nelayan	287

BAGIAN 9. KEMARITIMAN DAN PERUBAHAN IKLIM	291
» Perubahan Iklim, Privatisasi, dan Nasib Nelayan	291
» Perubahan Iklim dan Privatisasi Perikanan	294
» Perubahan Iklim versus Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pesisir.....	298
» Iklim dan Ekonomi Kelautan	303
» Kebijakan Perikanan Menghadapi Perubahan Iklim.....	305
» Perubahan Iklim dan Keadilan Masyarakat Pesisir.....	310
» COP 27 dan Paradigma Alternatif	312
BAGIAN 10. MASA DEPAN PEMBANGUNAN KELAUTAN	
MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN.....	317
» Paradoks Ekonomi Biru	317
» Kritik atas Ekonomi Biru Pembangunan Kelautan.....	321
» Ekonomi Biru dan Ketidakadilan Pembangunan Kelautan.....	325
» Ekonomi Biru, Utang, dan Ekstraktivisme	329
» Ekonomi (Perampasan) Biru?	333
» Antitesis Ekonomi Biru	336
» Rekonstruksi Ekonomi Biru.....	341
» Oligarki Perikanan Indonesia	344
» Menuju Keadilan Kelautan	348
» Pendekatan Alternatif untuk Taman Nasional Komodo....	352
» Merawat Eksistensi Bangsa Maritim Nusantara.....	357
BAGIAN 11. PENUTUP: JALAN ALTERNATIF MENUJU PEMBANGUNAN KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEMARITIMAN INDONESIA.....	361
DAFTAR PUSTAKA.....	365
BIODATA PENULIS.....	423